

PENGARUH PENDAPATAN DAN ANGGARAN BELANJA TERHADAP KAPASITAS FISKAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO

Ihwan Arifuddin¹

[ihwanarifuddin@student.umpalopo.ac.id](mailto:ihwanarifuddin@student umpalopo.ac.id)

Sapar²

sapar@umpalopo.ac.id

Salju³

salju@umpalopo.ac.id

ABSTRAK

Regional Revenue and Expenditure is an important factor in measuring the development of regional government so that the Fiscal Capacity of the Regional Government can be known, this aims to find out how much influence the Regional Revenue and Expenditure Budget has on the Fiscal Capacity of the Regional Government, especially in Palopo City. Researchers used quantitative research methods with associative research types. This research was conducted in the Regional Government of Palopo City, South Sulawesi Province. The population in this study is data on Regional Revenue, Regional Government Expenditures and Fiscal Capacity of Regional Governments, while the sample used is Regional Revenue and Regional Government Expenditures and the results of fiscal calculations for 10 years for the period 2011 to 2020. The analytical tool used is analysis Multiple Linear Regression using SPSS 18 and Eviews 10 Software. The results showed that Regional Income had a positive effect on Regional Fiscal Capacity in Palopo City and Regional Expenditure Budget had no effect on Regional Fiscal Capacity in Palopo City.

Keywords: *Regional Revenue, Regional Expenditure, Fiscal Capacity*

PENDAHULUAN

Kapasitas Fiskal Daerah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Otonomi Daerah, ditinjau dari kemampuan keuangan pemerintah Daerah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan Kapasitas Fiskal suatu Daerah agar mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Dengan peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah dari tahun ke tahun, maka dapat diketahui seberapa jauh perkembangan Otonomi disuatu Daerah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan Kapasitas Fiskal suatu Daerah agar mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. peningkatan kapasitas fiskal suatu Daerah juga memperlihatkan seberapa besarnya derajat perkembangan suatu Daerah. Penjabaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Anggaran

¹ Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo

² Dosen Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo

³ Dosen Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo

Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan dasar pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemerintahan Daerah Otonom. Dalam Pelaksanaan Otonomi tersebut tentunya dipengaruhi banyak faktor sehingga besarnya peningkatan kapasitas fiskal suatu Daerah juga memperlihatkan seberapa besarnya derajat perkembangan suatu Daerah.

Indeks Kapasitas Fiskal Kota Palopo ditahun 2019 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah 0,661 dengan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah. jika dilihat dari nilai diatas maka Kota Palopo masih dalam kategori rendah dibandingkan rata-rata Indeks Fiskal Kabupaten dan Kota lain di Indonesia, artinya Kota Palopo sebagian besar sumber Pendapatannya masih berasal dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar 83 % dari total Realisasi Pendapatan di tahun 2019 berdasarkan perhitungan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama tahun 2019 Kota Palopo mengalami pertumbuhan Ekonomi sekitar 6,75 atau masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 5,02 persen. Dimana Kapasitas Fiskal Daerah memiliki variabel yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi suatu Daerah. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengapa indeks Kapasitas Fiskal kota Palopo masih rendah jika dibandingkan rata-rata Indeks Fiskal Kabupaten/Kota lain di Indonesia padahal pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan Ekonomi Nasional, oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti pengaruh Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo.

Pendapatan Daerah secara umum dipengaruhi oleh Desentralisasi Fiskal, keberhasilan pelaksanaan Desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi,

perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan sektor publik.

Anggaran Belanja Daerah menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dengan meningkatnya perkembangan sistem komunikasi dan informasi teknologi memerlukan sumber pendapatan dan pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya, tak terkecuali di Pemerintah Daerah Kota Palopo. Kebutuhan Fiskal diperlukan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh yang dapat berasal dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

LANDASAN TEORI

Menurut Halim dalam Dwirandra A.A.N.B (2007) menyatakan “ (1). ciri utama suatu Daerah mampu melaksanakan Otonomi adalah kemampuan keuangan Daerah, yang berarti Daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD sebagai salah satu dasar dari komponen penentu kapasitas fiskal harus menjadi sumber keuangan terbesar yang dilakukan oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan Daerah”. Disini terlihat hubungan antara Pendapatan, Belanja dan Kapasitas Fiskal saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama dalam penyelenggaraan penganggaran pemerintahan di Daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah: “Semua penerimaan Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan”.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah;

Anggaran Belanja Daerah

Menurut Priyo (2009) belanja Daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan Daerah. Menurut Halim (2002) "Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran". Anggaran Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Anggaran Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tak Terduga;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional keuangan pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan Daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2007).

Kapasitas Fiskal Daerah

Menurut Alam (2007) berpendapat bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Sedangkan menurut Ahman (2007) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Rasyd (1998) dan Simanjuntak (2002) berpendapat bahwa Desentralisasi Fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum, yaitu 1. Untuk memenuhi aspirasi Daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan negara, 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah Daerah, 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah, 4. Mengurangi ketimpangan antar Daerah, 5. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik, dan 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, (Sukirno, 2003).

Kesinambungan Fiskal menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang pemerintah dalam membiayai kebutuhan belanjanya (Merifield, 2000).

“Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This resulted in persistent fiscal deficits consequently government had to borrow from both internal and

external sources” (Abba.et.al. 2015). Menyebutkan bahwa belanja pemerintah berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan penerimaan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal menyatakan Perhitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada:

- a. Pendapatan;
- b. Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan;
- c. Belanja tertentu;

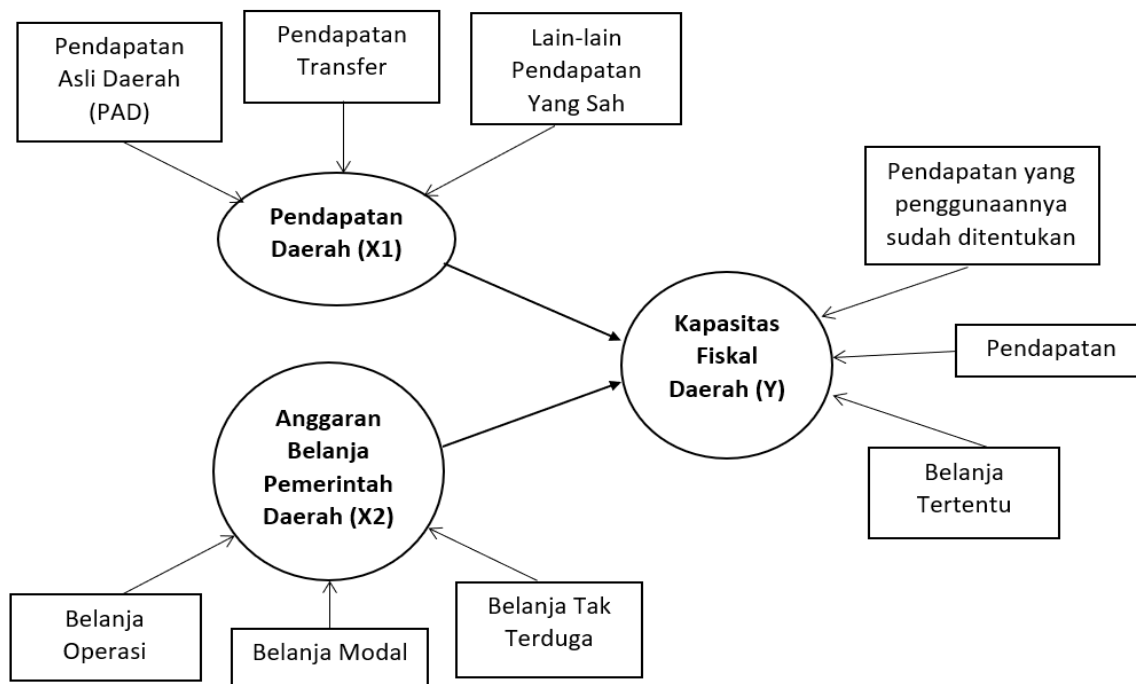
Kemandirian keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Daerah (Halim, 2002).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H1 : Adanya Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo.

H2 : Adanya Pengaruh Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo.

MODEL PENELITIAN



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif, Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian Asosiatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah, sedangkan sampel yang digunakan adalah Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah serta hasil perhitungan kapasitas fiskal selama 10 tahun untuk periode 2011 sampai 2020.

Teknik pengambilan data atau sampel dilakukan secara purposive sampling, tujuannya adalah agar sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Arikunto, (2006) purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, Daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Studi Pustaka, Dokumentasi serta Observasi dan Wawancara. Teknik Pengolahan Data Menggunakan Teknik Statistik, dimana tools yang digunakan dengan bantuan Software SPSS 18 dan Eviews 10.

Pada penelitian kali ini objeknya adalah Realisasi Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Nilai Kapasitas Fiskal tiap tahun di Pemerintah Kota Palopo, dengan menggunakan data time series. Saat dilapangan, peneliti akan melakukan observasi pengumpulan data primer berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Test of Goodness Fit (Uji Kesesuaian) dengan Variabel (X1) adalah Pendapatan Daerah, Variabel (X2) adalah Anggaran Belanja Daerah

dan Variabel (Y) adalah Kapasitas Fiskal Daerah, Sebelum melakukan analisis model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya menggunakan uji Statistik dengan Metode Regresi Berganda dengan perhitungan sebagai berikut :

Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi (R-Square) merupakan uji untuk mengetahui berapa besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah/variabel bebas (X) dengan satu peubah tak bebas (Y). Model Regresi Linear Berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Keterangan:

Y = Kapasitas Fiskal.

X1 = Pendapatan Daerah.

X2 = Anggaran Belanja Daerah.

β = Slope atau Koefisien estimate.

α = Konstanta, e = error.

Uji t - Parsial

Uji t - Parsial merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = \beta. \text{ dan } H_a : \beta_i \neq \beta.$$

Dimana β_i adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis biasanya β dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh X_i terhadap Y. Bila nilai t-hitung > t-tabel maka

tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

$H_0 : \beta = 0$ H_0 diterima ($-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq +t \text{ tabel}$) artinya variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$ H_a diterima ($-t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > +t \text{ tabel}$) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Daerah Kota Palopo

Pendapatan Daerah merupakan perolehan keuangan yang sah oleh Daerah yang memiliki Karakteristik antara Daerah dengan Daerah lain berbeda-beda, hal tersebut disebabkan karena perbedaan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Faktor pembeda tersebut digolongkan dalam faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Kekayaan Daerah dapat tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDRB). Perbedaan kekayaan Daerah tersebut berdampak pada berbedanya potensi pendapatan yang bisa digali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5 : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palopo TA 2011-2020

URAIAN/ TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN
2011	35.703.421.516	347.878.995.204	123.163.602.825	506.746.019.545
2012	36.214.002.330	421.381.856.521	67.926.027.106	525.521.885.958

2013	51.663.729.162	541.307.141.396	11.439.060.040	604.409.930.598
2014	81.646.676.135	607.256.402.094	15.352.435.366	704.255.513.596
2015	92.277.790.795	732.836.305.248	29.216.349.661	854.330.445.704
2016	134.110.076.220	844.256.444.772	25.980.053.524	1.004.346.574.517
2017	167.307.131.609	756.444.482.394	10.369.919.934	934.121.533.937
2018	139.282.846.484	798.286.111.200	27.214.994.021	964.783.951.705
2019	165.664.354.780	783.143.902.367	35.692.000.143	984.500.257.290
2020	177.205.052.456	719.692.245.075	72.511.637.061	969.408.934.593

Sumber : LKPD Pemerintah Kota Palopo 2011-2020

Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel diatas, dimana setiap tahunnya menagalim perubahan yang cukup besar dikarenakan adanya perubahan target dan realisasi pendapatan pada tahun berjalan. pada tahun 2016 terjadi peningkatan Dana Transfer yang cukup besar akibat dari alokasi Dana Perimbangan untuk Kota Palopo bertambah signifikan dan kembali berkurang di tahun setelahnya hal ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan Negara yang dihitung dengan perhitungan celah fiskal daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang alokasi Dana Transfer. sedangkan sumber pendapatan tertinggi pada tiap tahunnya disumbang oleh Pendapatan transfer dengan rata-rata sebesar 80% dari total Pendaptan Daerah Kota Palopo..

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Palopo

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selisih antara anggaran dan pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Daerah.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja Daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik

Daerah dan Standarisasi Sarana Prasarana Pemerintah Daerah Kota Palopo yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran Belanja Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 6 : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Palopo TA 2011-2020

URAIAN/ TAHUN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	TOTAL ANGGARAN BELANJA
2011	376.926.298.217	100.348.306.723	1.100.000.000	478.374.604.940
2012	400.500.919.180	86.867.386.460	1.800.000.000	489.168.305.640
2013	495.073.283.128	104.903.297.922	500.000.000	600.476.581.050
2014	588.828.094.528	105.531.784.168	500.000.000	694.859.878.696
2015	657.312.315.807	229.006.483.891	981.000.000	887.299.799.698
2016	716.430.062.310	432.200.712.394	500.000.000	1.149.130.774.704
2017	700.739.764.669	314.654.433.345	400.000.000	1.015.794.198.014
2018	766.647.136.152	253.333.799.313	400.000.000	1.020.380.935.465
2019	784.029.146.603	223.028.456.443	1.000.000.000	1.008.057.603.046
2020	759.432.688.244	325.870.177.102	8.937.251.000	1.094.240.116.346

Sumber : LKPD Pemerintah Kota Palopo 2011-2020

Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir secara detail dapat dilihat pada tabel diatas, dimana setiap tahunnya mengalami perubahan Anggaran yang tidak terlalu besar kecuali di tahun 2016, hal ini dikarenakan kebutuhan pendanaan pada Organisasi Perangkat Daerah tidak terlalu banyak mengalami perubahan disamping dipengaruhi juga besaran proyeksi pendapatan di tahun berjalan. Tahun 2016 terjadi peningkatan Anggaran Belanja yang cukup signifikan dibanding tahun lainnya dikarenakan pada tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo mendapatkan Alokasi Dana Transfer yang tinggi di tahun tersebut dimana hal ini ditentukan oleh perhitungan celah fiskal ditahun tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Kota Palopo

Formula Peta Kapasitas Fiskal Peta kapasitas fiskal Daerah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Republik Indonesia, 2012). Untuk memenuhi ketentuan tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2020). Dalam ketentuan umum Kapasitas Fiskal diartikan sebagai gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah didefinisikan sebagai gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: a. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah; b. Penilaian atas usulan pinjaman Daerah; c. Penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/ atau d. Hal-lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil perolehan Kapasitas Fiskal Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel Realisasi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Palopo TA 2011-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan	Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	Belanja Tertentu	Kapasitas Fiskal Daerah
2011	506.746.019.545	156.173.919.774	280.774.625.885	69.797.473.886
2012	525.521.885.958	99.580.031.521	307.924.404.945	118.017.449.492
2013	604.409.930.598	92.765.462.515	340.769.534.447	170.874.933.636
2014	704.255.513.596	117.683.575.227	402.596.313.464	183.975.624.905
2015	854.330.445.704	232.159.440.034	443.981.364.817	178.189.640.853
2016	1.004.346.574.517	319.447.315.544	487.108.859.824	197.790.399.149
2017	934.121.533.937	291.720.123.702	420.049.592.933	222.351.817.302
2018	964.783.951.705	229.869.564.819	432.511.142.433	302.403.244.453
2019	984.500.257.290	211.637.869.970	456.561.467.714	316.300.919.606
2020	969.407.489.043	229.869.564.819	469.261.449.439	270.276.474.785

Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2020

Dalam tabel di atas terlihat setiap tahunnya Nilai Kapasitas Fiskal mengalami perubahan yang tidak signifikan, hal ini dikarenakan Penerimaan Pendapatan dari Dana Transfer sebagian besar telah diatur penggunaannya dalam APBD sehingga pertumbuhan Kapasitas Fiskal sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan Belanja Tertentu.

Analisis Pengaruh Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Kota Palopo

Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik bertujuan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui uji statistik yaitu dilakukan dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*. Suatu variabel dikatakan normal jika nilai *Sig.* atau probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000977
	Std. Deviation	3.26393505E10
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.097
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.342
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel diatas Hasil Uji Normalitas analisis statistik (K-S) menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh adalah 0,342 dan signifikansi jauh di atas 0,05 yaitu 1,000. Dengan kata lain bahwa nilai KS tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

Uji Lineritas

Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan.

Ramsey RESET Test			
Equation: UNTITLED			
Specification: KAPASITAS_FISKAL C PENDAPATAN ANGGARAN_BELANJ			
A			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	df	Probability
t-statistic	0.370082	6	0.7240
F-statistic	0.136961	(1, 6)	0.7240
Likelihood ratio	0.225702	1	0.6347
F-test summary:			
	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	2.14E+20	1	2.14E+20
Restricted SSR	9.59E+21	7	1.37E+21
Unrestricted SSR	9.37E+21	6	1.56E+21
LR test summary:			
	Value		
Restricted LogL	-255.7504		
Unrestricted LogL	-255.6376		

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Uji Linearitas dengan Eviews di atas adalah menggunakan uji Ramsey Reset Test, dimana hasilnya bisa anda lihat pada nilai p value yang ditunjukkan pada kolom probability baris F-statistics. Hasilnya dalam tutorial ini adalah sebesar 0,7240 dimana $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas linear dengan variabel terikat.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing-masing variabel independen berhubungan secara linier. Yang dimaksud dengan Uji Multikolinieritas adalah suatu situasi adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lainnya. Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF. Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, dan sebaliknya jika VIF diatas 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gejala multikolinieritas. Serta dengan melihat nilai Tolerance $< 0,10$ menunjukkan adanya multikolinieritas.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Apabila terjadi korelasi antar variabel independen, maka terdapat masalah multikolinearitas atau terdapat variabel-variabel tidak ortogonal, artinya nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai Tolerance. Adapun kriteria pengukurannya yaitu:

- 1) Jika nilai VIF > 0,10 dan nilai tolerance < 0,10 artinya dalam penelitian memiliki masalah multikolinieritas.
- 2) Jika nilai VIF < 0,10 dan nilai tolerance > 0,10 artinya dalam penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Tabel 9 : Uji Multikolinearitas pada variabel

Coefficients ^a							
	Standardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	-1.902E11	8.098E10		-2.349	.051		
	1.257	.463	3.231	2.714	.030	.018	56.540
	-.733	.363	-2.403	-2.018	.083	.018	56.540

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas, maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen menunjukkan terjadi multikolinearitas, karena nilai tolerance adalah 0,018 atau kurang dari 0,10. Selain itu, nilai VIF juga menunjukkan hasil bahwa antar variabel independen terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF masing-masing variabel lebih dari 10 atau nilai VIF > 10 yaitu 56,540. Untuk mengatasi multikolinearitas adalah dengan cara Melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel, dimana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan dengan pengamatan lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Adapun kriteria pengukurannya yaitu:

- 1) Jika nilai VIF > 0,10 dan nilai tolerance < 0,10 artinya dalam penelitian memiliki masalah multikolinieritas.
- 2) Jika nilai VIF < 0,10 dan nilai tolerance > 0,10 artinya dalam penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Tabel Uji Heteroskedastisitas pada variabel
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.910E10	3.922E10		1.252	.251
X1	-.254	.224	-2.865	-1.133	.295
X2	.215	.176	3.090	1.222	.261

a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai Sig. X1 adalah 0,295 dan X2 adalah 0,261. Dikarenakan nilai Sig. lebih dari 0,05 atau tolerance > 0,05, karena nilai Sig. masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka data terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Imam Ghazali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik DurbinWatson (D-W) yaitu :

- a) Jika angka Durbin Watson $DW < dL$ berarti terdapat autokorelasi positif.
- b) Jika angka Durbin Watson $dU \leq DW \leq 4 - dU$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika angka Durbin Watson $> 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 11 : Uji Autokorelasi pada variabel

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.908 ^a	.824	.774	3.7010E10	1.198

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat DW = 1.198, dan pada tabel DW = (K;n) = (3;10) adalah dL = 0.6972 dan dU = 1.6413 sehingga 4-dU = 4 - 1.6413 = 2,358 dan 4-dL = 4 - 0.6972 = 3,302 maka Hasil yang diperoleh yaitu dL = 0.6972 < DW = 1.198 < dU = 1.6413 sehingga diperoleh pernyataan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Karena belum menghasilkan kesimpulan maka lanjut ke pengujian Uji Run Test;

Tabel 12 : Uji Run Test pada variabel

Runs Test	
	Standardized Residual
Value ^a	2.58875E9
< Test Value	5
>= Test Value	5
Cases	10
Number of Runs	4
Z	-1.006
. Sig. (2-tailed)	.314

a. Median

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Dari tabel Uji Run Test diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,314 dimana jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis Regresi Berganda. Dalam penelitian ini analisis yang di gunakan yaitu Analisis Regresi Berganda. Regresi Berganda sering kali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Variabel yang digunakan yaitu Kapasitas Fiskal (Y), Pendapatan Daerah (X1) dan Anggaran Belanja (X2) dengan fungsi persamaan Data Panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kapasitas Fiskal.

α = Konstanta.

X1 = Pendapatan Daerah.

e = error.

X2 = Anggaran Belanja Daerah.

β = Slope atau Koefisien estimate.

Ringkasan hasil regresi berganda dari variabel diatas disajikan sebagai berikut:

Dependent Variable: KAPASITAS_FISKAL
 Method: Least Squares
 Date: 05/05/21 Time: 09:55
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.90E+11	8.10E+10	-2.348577	0.0512
PENDAPATAN	1.256814	0.463124	2.713774	0.0300
ANGGARAN_BELANJA	-0.733422	0.363452	-2.017936	0.0834
R-squared	0.824462	Mean dependent var		2.03E+11
Adjusted R-squared	0.774308	S.D. dependent var		7.79E+10
S.E. of regression	3.70E+10	Akaike info criterion		51.75009
Sum squared resid	9.59E+21	Schwarz criterion		51.84086
Log likelihood	-255.7504	Hannan-Quinn criter.		51.65050
F-statistic	16.43869	Durbin-Watson stat		1.197853
Prob(F-statistic)	0.002266			

$$\begin{aligned} \sum Y &= an + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 \\ \sum X_1 Y &= a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 \\ \sum X_2 Y &= a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 \end{aligned}$$

Sumber : Data Primer diolah dengan EVIEWS 10, 2021.

Dari hasil pengolahan data diperoleh :

$$a = -1,90$$

$$b1 = 1,256814$$

$$b2 = - 0,7334322$$

Persamaan Regresi:

$$Y = \alpha + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + e$$

$$Y = -1,90 + 1,256814 X_1 - 0,7334322 X_2$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa: C = -1,90 artinya apabila variabel X_1 dan X_2 nilainya = 0 dan tidak ada perubahan maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1,90%.

Pendapatan (X_1) = 1,256814, artinya dengan asumsi Anggaran Belanja tetap, maka setiap peningkatan Pendapatan sebesar 1% akan menaikkan Kapasitas Fiskal sebesar 1,256814%. Tanda positif pada X_1 merupakan arah pengaruh Pendapatan terhadap Kapasitas Fiskal. Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal dan signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Anggaran Belanja (X_2) = -0,7334322, artinya dengan asumsi Pendapatan tetap, maka setiap peningkatan Anggaran Belanja sebesar 1% akan menurunkan Kapasitas Fiskal sebesar 0,7334227%. Tanda Negatif pada X_2 menunjukkan bahwa Anggaran Belanja berpengaruh negatif terhadap Kapasitas Fiskal dan signifikan pada $\alpha = 5\%$.

$$R = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Tabel Uji R-Square pada variabel

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.824	.774	3.7010E10

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,824 yang artinya Pendapatan (X_1) dan Anggaran Belanja (X_2) secara serentak dan bersama-sama / Simultan mempengaruhi variabel dependen sebesar 82% jika Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah (Y) Konstan. Sisanya sebesar 18% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model/persamaan regresi.

Uji t - Parsial

Uji t Parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial [sendiri] kuat signifikan terhadap variabel (Y).

Dasar Pengambilan Keputusan untuk Uji t Parsial dalam Analisis Regresi. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel : Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas kuat terhadap variabel terikat atau Ho diterima. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak kuat terhadap variabel terikat atau Ho ditolak. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS: Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak kuat signifikan terhadap variabel terikat :

Tabel Uji t - Parsial pada variabel

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.902E11	8.098E10		-2.349	.051
	1.257	.463	3.231	2.714	.030
	-.733	.363	-2.403	-2.018	.083

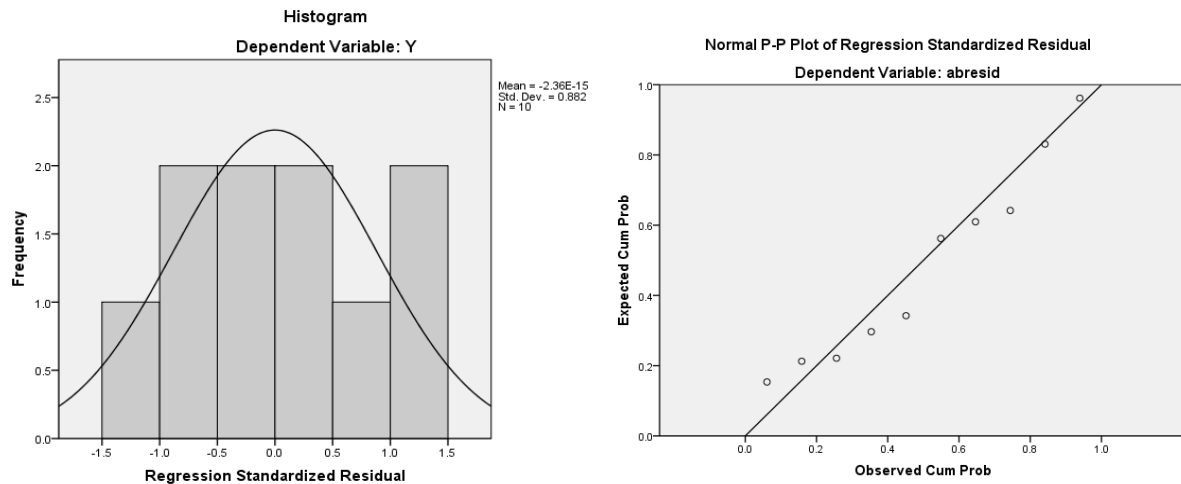
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel output SPSS "Coefficients" diatas Uji t pertama dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pendapatan Daerah (X1) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y) yaitu diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel Pendapatan Daerah (X1) adalah sebesar 0,03. Karena nilai Sig. 0,03 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho atau hipotesis pertama ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh Pendapatan Daerah (X1) terhadap Kapasitas Fiskal (Y). dari tabel diatas juga terlihat nilai t hitung variabel Pendapatan Daerah adalah sebesar 2,714. Karena nilai t hitung 2,714 > t tabel 2,228, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh Pendapatan Daerah (X1) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y).

Uji t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Anggaran Belanja Daerah (X2) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y) yaitu diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel Anggaran Belanja Daerah (X2) adalah sebesar 0,083. Karena nilai Sig. 0,083 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho atau hipotesis pertama diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh Anggaran Belanja Daerah (X2) terhadap Kapasitas Fiskal (Y). dari tabel diatas juga terlihat nilai t hitung variabel Anggaran Belanja adalah sebesar -

2,018. Karena nilai t hitung $-2,018 > t$ tabel $-2,228$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh Anggaran Belanja Daerah (X_2) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y).



Gambar 2

Histogram dan Normal P-P Plot Residual variabel X_1 , X_2 , dan Y

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Pendapatan Daerah menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah yang berpola positif sehingga semakin bertambah nilai Pendapatan Daerah, maka semakin besar nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Nilai koefisien Pendapatan Daerah sebesar 1.256796 berarti bahwa setiap Pendapatan Daerah bertambah 1% maka Kapasitas Fiskal Daerah akan naik sebesar 1,25%.

Hasil analisis regresi untuk pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan probabilitas sebesar $0,03 < 0,050$. Nilai ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a yang menyatakan Adanya Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah, diterima.

Terjadi peningkatan Kapasitas Fiskal saat Pendapatan Daerah mengalami kenaikan diakibatkan oleh pengaruh Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan Belanja

Tertentu yang mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo pada tahun berjalan, hal ini mengakibatkan kapasitas fiskal pada pemerintah Daerah Kota Palopo mengalami peningkatan yang kurang signifikan dari tahun ketahun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya belanja pegawai dan belanja bunga pada anggaran belanja, disamping meningkatnya belanja tertentu terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil penelitian ini memperkuat teori Halim (2002), yaitu Pendapatan Daerah sangat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Jaka Sriyana, (2009), yang menyatakan adanya pengaruh pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

Pendapatan Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Palopo juga dibuktikan oleh salah satu hasil wawancara aparatur keuangan BPKAD Kota Palopo sebagai berikut:

“Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan penerimaan di Daerah, termasuk PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pendapatan Daerah ini sangat mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah merupakan penentu besaran Kapasitas Fiskal Daerah. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah mencerminkan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah Daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah Daerah sudah berkualitas yaitu pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah.

Dari hasil uji statistik, kesesuaian dengan landasan teori dan penelitian terdahulu serta hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Koefisien regresi variabel Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sehingga semakin tinggi Pendapatan Daerah, maka semakin baik pula Kapasitas Fiskal Daerah. Hasil

ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah berkontribusi terhadap Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Anggaran Belanja menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah yang berpola Negatif sehingga semakin bertambah nilai Anggaran Belanja, maka semakin kecil nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Nilai koefisien Pendapatan Daerah sebesar -0.7334307 berarti bahwa setiap Pendapatan Daerah bertambah 1% maka Kapasitas Fiskal Daerah akan turun sebesar 0.733%.

Hasil analisis regresi untuk pengaruh Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan probabilitas sebesar $0,083 > 0,050$. Nilai ini mengindikasikan bahwa Anggaran Belanja tidak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 yang menyatakan Adanya Pengaruh Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo, ditolak.

Anggaran Belanja tidak pengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah, Hal ini disebabkan oleh penggunaan Anggaran Belanja ditentukan oleh realisasi Pendapatan Daerah dalam suatu priode realisasi Penerimaan Daerah.

Anggaran Belanja menentukan Pembangunan Fisik maupun Non Fisik di Kota Palopo, jika Belanja Operasional lebih besar dari belanja Modal maka secara tidak langsung dapat mengurangi kemampuan Fiskal Daerah kedepannya. Belanja Modal dapat meningkatkan pendapatan di tahun-tahun selanjutnya jika direncanakan dan dikelola dengan baik.

Hasil penelitian ini memperkuat teori Abba. et.al. (2015) menyebutkan bahwa belanja pemerintah berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan penerimaan pemerintah. Situasi tersebut mengakibatkan Defisit Fiskal yang berkelanjutan dan mengakibatkan Pemerintahan melakukan pememinjaman yang bersumber dari dalam dan luar pemerintahan.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Liza Flona, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati (2016), yang menyatakan Belanja Pegawai (BP) mempunyai pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal namun dengan arah negatif.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil wawancara dengan aparaturnya pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo yang menjadi objek penelitian. Berikut kutipan wawancara beliau:

“Anggaran Belanja Daerah itu dipersiapkan untuk membiayai kegiatan di Pemerintahan, Baik Gaji Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN maupun Pegawai Tidak Tetap. hal ini tidak berpengaruh terhadap kemampuan Fisikal dan perhitungan Kapasitas Fiskal tiap tahunnya karena sesuai APBD”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Anggaran Belanja berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Pengaruh Anggaran Belanja ini tidak signifikan dan akan mengurangi Kapasitas Fiskal, hal ini menjadikan Anggaran Belanja berdampak negatif terhadap Kas Daerah.

Dari hasil uji statistik, kesesuaian dengan landasan teori dan penelitian terdahulu serta hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang negatif antara Anggaran Belanja Daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Koefisien regresi variabel Anggaran Belanja Daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sehingga semakin tinggi Anggaran Belanja Daerah, maka semakin rendah Kapasitas Fiskal Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa Anggaran Belanja Daerah berkontribusi terhadap Penurunan Kapasitas Fiskal Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1). Terjadi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo melebihi pertumbuhan nasional, namun indeks Kapasitas Fiskal Kota Palopo masih dalam kategori rendah dibanding Daerah lain, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan indikator pembangunan dari sektor lain lebih baik dari Daerah lain sedangkan Pendapatan Pemerintah Daerah masih kurang dibanding Faktor lain penunjang pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

2). Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo. Hasil ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah berkontribusi terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

3). Anggaran Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo. Hasil ini mengindikasikan bahwa Anggaran Belanja Daerah tidak secara langsung mempengaruhi Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Berikut ini beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1). Mengingat pentingnya Pengelolaan Keuangan yang baik untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, pemerintah Pusat dan Daerah perlu secara rutin mengadakan diklat dan bimtek dalam Penganggaran dan Penyusunan laporan keuangan serta melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.

2). Untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah diperlukan perencanaan yang matang dan perhitungan perhadapan Pendapatan terhadap Belanja terutama pada Belanja Modal sehingga kedepannya dapat meningkatkan potensi penerimaan Daerah dan secara tidak langsung meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah.

3). Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah dan diharapkan penelitian selanjutnya terlebih dahulu memilih sumber data yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba et al., (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Art, Science and Commerce*, 6(1), Pp:67-77.
- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 2. November 2006. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168571.
- Adi, Priyo hari. (2009). Dampak Program Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). *Jurnal. Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Ahman, Eeng. (2007). Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Bandung: *Laboratorium Ekonomi dan Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Alam, S. (2007). *Ekonomi*, Jilid 2. Jakarta: Esis.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Akyuwen Roberto. (2013) *Kajian Akademis BPPK. Analisis Kapasitas Fiskal Kota Study Komparasi Kota Yogyakarta dan Kota Ambon*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Dincecco, M., and M. Prado. (2012). "Warfare, Fiscal Capacity, and Performance." *Journal of Economic Growth* 17 (3): 171–203. doi:10.1007/s10887-012-9079-4.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2007). " Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006." *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana, Bali*, Vol 3 No. 2 Juli 2008. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2592>.
- Ering, S., Hakim, D.B. dan Juanda, B. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. An Analysis on North Sulawesi's Local Tax Potential to Strengthening Its Fiscal Capacity. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No. 1 Juli 2016: 75-87*. <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/660>.
- Juma'eh, Harin Tiawon, Alexandra Hukom. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, *Journal of Environment and Management* 1(1), 40-45, Januari 2020. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/download/1204/987>.
- Lisna Lisnawati. (2018). "Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat" *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi*, Vol 4 No 2 September 2018, <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/183>.

- Liza Flona, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. (2016). "Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah di Sumatera". *Jurnal Ekonomi*/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 232-247. <https://www.researchgate.net/publication/313878856>.
- Merifield, J. (2000). State Government Expenditure Determinants and Tax Revenue Determinants Revisited, *Public Choice*, 102, 25–48. Januari 2000. <https://doi.org/10.1023/A:1005036918713>.
- Ma, D., and J. Rubin. (2017). "The Paradox of Power: Understanding Fiscal Capacity in Imperial China and Absolutist Regimes," mimeo.
- Merifield, J. (2000). State Government Expenditure Determinants and Tax Revenue Determinants Revisited, *Public Choice*, 102, 25–48. Januari 2000. <https://doi.org/10.1023/A:1005036918713>.
- Mendoza, E. G., and P. M. Oviedo. (2006). "Fiscal Policy and Macroeconomic Uncertainty in Developing Countries: The Tale of the Tormented Insurer," NBER Working Papers, 12586.
- Nikolay Patonov. (2013) Local Fiscal Capacity in the New Members of the European Union: Is It Efficient?, *International Journal of Synergy and Research* Vol. 2, No. 1, 2013. <https://ideas.repec.org/a/tkp/ijsrsy/v2y2013i1p57-70.html>.
- Nuarisa, SA. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol 2 No 1, March 2013. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1163>.
- Rasyid, R., (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sapar. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Unhas Press, Makassar.
- Simanjuntak, Robert A. (2002). *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM – FEUI, MPKP – FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta : Kompas
- Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar teori makro ekonomi*, PT.Raja grafindo persada, Jakarta.
- Sriyana, Jaka. (2012). *Dinamika Kinerja Fiskal Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sriyana, Jaka. (2009). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul, *UNISIA*, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2720/2507>.